



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan. Penyusunan LKjIP ini merupakan pelaksanaan kewajiban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2021–2026. LKjIP ini menyajikan informasi mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja, serta realisasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2025, disertai dengan analisis capaian kinerja dan penggunaan sumber daya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Bengkalis tahun 2025 ini disusun, semoga dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Bengkalis, Januari 2026

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bengkalis,



RINTO, SE, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19810601 200903 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang mempunyai tugas urusan penunjang perencanaan yang diatur dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan;
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di lingkungan perencanaan pembangunan daerah;
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pembangunan daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Bappeda Kabupaten Bengkalis yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Bappeda Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026. Upaya mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam rencana strategis. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2025, Bappeda Kabupaten Bengkalis memiliki 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tersebut, dari 3 (tiga) indikator kinerja menunjukkan bahwa indikator kinerja tersebut memiliki capaian kategori kinerja dengan predikat sangat tinggi dari interval realisasi

kinerja kategori antara $91\% \leq 100\%$. Pada Sasaran 1 (satu) : Meningkatnya Kualitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Predikat Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) mendapatkan rata-rata capaian sebesar 93,06% dengan Predikat Sangat Tinggi, Sasaran 2 (dua) : Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko dengan indikator Level Maturitas Manajemen Risiko Indeks mendapatkan rata-rata capaian sebesar 95,53% dengan predikat Sangat Tinggi dan Sasaran 3 (tiga) : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah mendapatkan rata-rata capaian 97,93% dengan predikat nilai kinerja “Sangat Tinggi”.

Sementara itu, Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 sebesar Rp. 20.616.473.205,00 dengan realisasi sebesar Rp. 19.515.243.788,00 atau 94,66%. Terjadinya peningkatan realisasi keuangan dibandingkan pada tahun 2024 sebesar 80,24%. Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum rata-rata capaian kinerja Bappeda Kabupaten Bengkalis tahun 2025 telah mencapai 95,50% atau dengan skala penilaian “Sangat Tinggi”. Dan hasil pengukuran kinerja ini akan digunakan sebagai acuan bagi Bappeda Kabupaten Bengkalis dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Tugas dan Fungsi	3
1.4 Struktur Organisasi.....	3
1.5 Landasan Hukum.....	5
1.6 Identifikasi Permasalahan.....	7
1.7 Isu Strategis	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Rencana Strategis Tahun 2016 -2021.....	9
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
3.1 Pengukuran Kinerja.....	11
3.2 Analisis Kinerja	13
3.3 Realisasi Anggaran	22
3.4 Analisis Efisiensi	23
BAB IV PENUTUP.....	24

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	9
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2025	10
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	12
Tabel 3.2	Pencapaian Kinerja Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2025...	13
Tabel 3.3	Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025	13
Tabel 3.4	Realisasi Indikator Sasaran 1	15
Tabel 3.5	Realisasi Indikator Sasaran 2	17
Tabel 3.6	Realisasi Indikator Sasaran 3	19
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran Tahun 2025	23
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran Sesuai Sasaran Kinerja Tahun 2025	23
Tabel 3.9	Tingkat Efisiensi Anggaran Capaian Kinerja Tahun 2025	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis	4
--	---



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap tahun, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) sebagai instrumen evaluasi dan pengukuran keberhasilan pencapaian kinerja tahunan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah.

Laporan kinerja merupakan wujud akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dalam penggunaan anggaran. Selain itu, penyusunan laporan kinerja juga merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam penyusunan laporan kinerja, diperlukan adanya rencana dan target yang telah ditetapkan, pengukuran serta evaluasi kinerja, dan analisis terhadap setiap sasaran strategis, program, atau kegiatan, termasuk kondisi akhir yang diharapkan. Analisis tersebut juga mencakup aspek efisiensi dalam penggunaan sumber daya serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil pengukuran dan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan.



Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai bentuk komitmen dan kesanggupan dalam melaksanakan program serta kegiatan selama satu tahun anggaran. Laporan ini disampaikan kepada Bupati sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja Tahun 2025.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi serta bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai sarana bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada para *stakeholders*.
- 2) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat mengenai capaian kinerja yang telah diperoleh maupun yang seharusnya dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis; dan
- 3) Menjadi sarana evaluasi terhadap pencapaian kinerja dalam rangka peningkatan dan perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

1.3 Tugas dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas fungsi penunjang urusan perencanaan yang mempunyai fungsi, yaitu :

- 1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan;



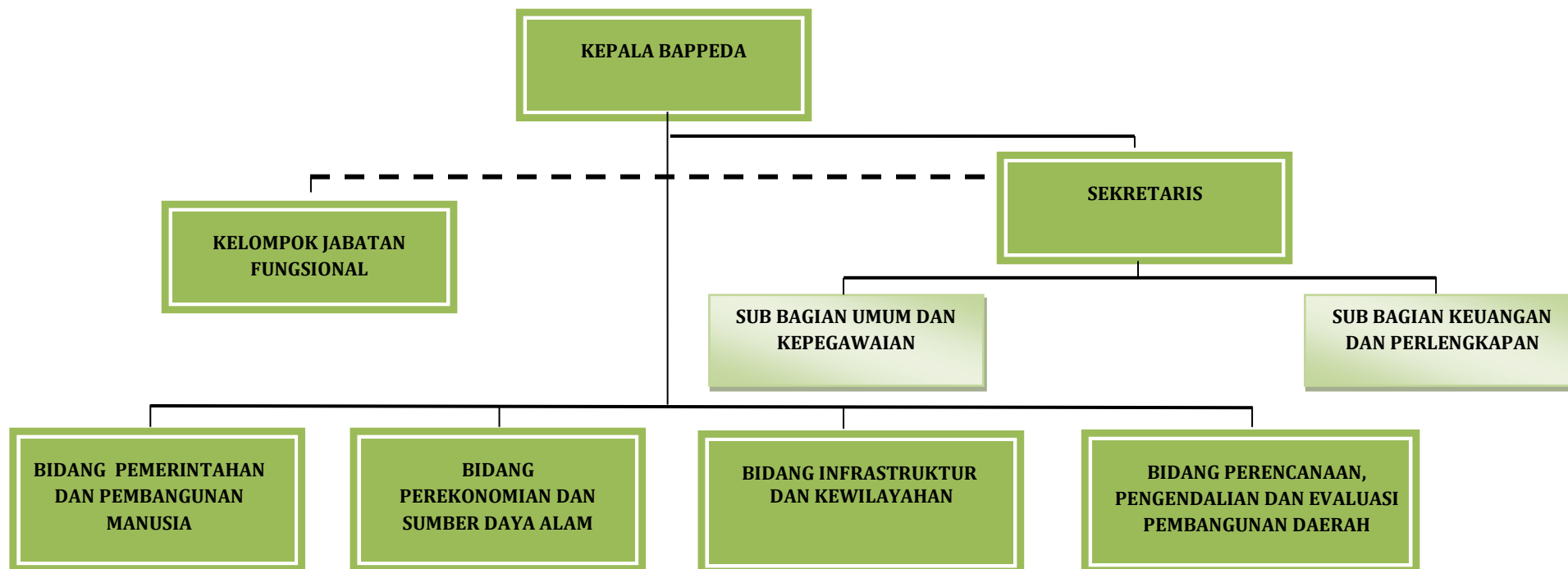
- 2) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di lingkungan perencanaan pembangunan daerah;
- 4) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Badan; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

1.4 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Bappeda Kabupaten Bengkalis, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
 - 3) Kelompok JF.
- c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari:
 - 1) Kelompok JF.
- d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:
 - 1) Kelompok JF.
- e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari:
 - 1) Kelompok JF.
- f. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari:
 - 1) Kelompok JF.
- g. Kelompok Jabatan fungsional.

Adapun struktur organisasi Bappeda Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada bagan berikut.



Gambar 1.1

Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan



1.5 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Bappeda Kabupaten Bengkalis, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;



8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 07);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2021 tentang Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis;
15. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 52).



1.6 Identifikasi Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan memerlukan tahapan waktu yang cukup panjang dalam rangkaian kegiatan, sehingga pelaksanaannya sering kali tidak tepat waktu;
2. Kompetensi aparatur perencana serta pemahaman terhadap pentingnya sinergi dalam proses perencanaan masih terbatas;
3. Tuntutan terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel memerlukan dukungan data pembangunan yang lengkap dan mutakhir;

1.7 Isu Strategis

Penentuan isu strategis dilakukan melalui analisis terhadap faktor-faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan layanan, serta identifikasi tantangan dan peluang dalam pengembangan layanan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis ditetapkan sebagai berikut:

1. Optimalisasi kelembagaan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kapasitas perencanaan, baik dalam penyusunan dokumen perencanaan maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia perencana;
2. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi perencanaan secara intensif antar bidang, urusan, dan lintas sektor guna mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, khususnya dalam mendukung program prioritas nasional;
3. Pengembangan sistem informasi perencanaan yang transparan, akuntabel, efisien, serta selalu diperbarui sesuai dengan perkembangan terkini;



4. Penyediaan data dan informasi yang lengkap, valid, akurat, berkesinambungan, serta mudah diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan;
5. Penguatan fungsi pengendalian, monitoring, dan evaluasi perencanaan, sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan di masa mendatang;
6. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur perencana dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda sebagai perumus kebijakan perencanaan pembangunan daerah.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Bengkalis tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026 yang telah dilakukan penyesuaian tujuan, sasaran strategis dan indikator sasaran serta target kinerja untuk Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2025.

Berdasarkan perubahan Pohon Kinerja Perangkat Daerah (Prototype) sebagai bagian dari penyelarasan terhadap Pohon Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bengkalis, telah pula dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Tujuan, Sasaran dan Indikator Strategis seperti tertuang pada Tabel 2.1. berikut:

2.1 Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	Kondisi Ext Thn 2020	TARGET KINERJA TAHUN KE						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Berkarakter	Indek Reformasi Birokrasi	50	50	55	60	63	65	72	72
Meningkatnya Kualitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Predikat Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD)	94,54	Sangat Tinggi (96)	Sangat Tinggi (96)	Sangat Tinggi (97)	Sangat Tinggi (97)	Sangat Tinggi (98)	Sangat Tinggi (98)	Sangat Tinggi (98)
Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko	Level Maturitas Manajemen Risiko Indeks	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	60	65	70	75	80	80	80	80



2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dan telah dilakukan perubahan (Prototype) Pohon Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan ditetapkan tujuan, sasaran, indikator strategis serta Perubahan Indikator Kinerja Utama pada Bappeda Kabupaten Bengkalis sebagai ukuran keberhasilan kinerja pelayanan pada urusan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis. Indikator Kinerja Utama yang menjadi Perjanjian Kinerja tahun 2025 telah disepakati dan ditandatangani bersama oleh Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis dengan Bupati Kabupaten Bengkalis yang menjadi tanggung jawab Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi serta Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Predikat Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD)	Sangat Tinggi (98)
2.	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko	Level Maturitas Manajemen Risiko Indeks	Level 3
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	80

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.2 menjadi tolak ukur keberhasilan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis yang akuntabel dalam menentukan keberhasilan pencapaian, sasaran dan indikator Renstra Tahun 2021-2026 serta perubahan terakhir (Prototype) Pohon Kinerja Perangkat Daerah.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2025.

3.1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Salah satu fondasi utama dalam penerapan manajemen kinerja adalah pelaksanaan pengukuran kinerja yang bertujuan untuk menjamin peningkatan kualitas pelayanan publik serta memperkuat akuntabilitas instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan melalui klarifikasi terhadap *output* dan *outcome* yang akan maupun seharusnya dicapai, guna mendukung terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan membandingkan antara kinerja yang diharapkan dengan kinerja yang terealisasi. Kegiatan pengukuran ini dilakukan secara berkala, baik setiap triwulan maupun setiap akhir tahun. Hasil pengukuran dan perbandingan tersebut disajikan dalam Laporan Kinerja agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi dan capaian kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dengan realisasi kinerja yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Utama Tahun 2025. Melalui perbandingan antara target dan realisasi tersebut, tingkat capaian kinerja dapat diukur secara objektif. Semakin tinggi tingkat realisasi terhadap target yang telah ditetapkan,



maka semakin baik pula capaian kinerjanya. Sebaliknya, apabila realisasi kinerja lebih rendah dari target, hal tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja belum optimal.

Skala penilaian yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode Warna
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi	
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi	
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang	
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah	
5.	$\leq 50\%$	Sedang Rendah	

Target, realisasi dan pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.2

Pencapaian Kinerja Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Predikat Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD)	Predikat	Sangat Tinggi (98)	Sangat Tinggi (91,20)*	93,06%
2.	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko	Level Maturitas Manajemen Risiko Indeks	Level	Level 3	Level 2	95,53%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	80	78,35*	97,93%

Keterangan : *) Realisasi sementara hasil evaluasi tahun 2024

3.2. Analisis Kinerja

Pencapaian kinerja merupakan dasar dalam mengukur keberhasilan indikator kinerja program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja tersebut terdiri dari 3 (tiga) indikator memiliki predikat **“Sangat Tinggi”**. Secara rinci dapat dilihat dari tabel dibawah ini.



Tabel 3.3
Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

No.	Indikator	Satuan	Capaian			2025			Target Tahun 2026	Capaian 2025 Terhadap 2026
			2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
	Persentase Kesesuaian RKPD dengan RPJMD	%	97,95							
	Persentase Kesesuaian Prioritas Nasional dengan Daerah	%	100							
	Indeks Profesional SDM Perencanaan	Nilai	71							
1.	Predikat Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD)	Predikat		92,29 %	94,02%	Sangat Tinggi (98)	Sangat Tinggi (91,20)*	93,06%	Sangat Tinggi (98)	93,06%
2.	Level Maturitas Manajemen Risiko Indeks	Level		Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	95,53%	Level 3	95,53%
3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	100%	100%	97,93%	80	78,35*	97,93%	A	97,39%
Rata-rata Capaian								95,50%		

Keterangan : *) Realisasi sementara hasil evaluasi tahun 2024

Uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikator adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 (satu) : Meningkatnya Kualitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Predikat Perencanaan



Pembangunan Daerah (PPD) mendapatkan rata-rata capaian sebesar 94,02% dengan Predikat **“Sangat Tinggi”** seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.4

Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran 1

No	Indikator	Satuan	Capaian		2025			Target Tahun 2026	Capaian 2025 Terhadap p 2026
			2023	2024	Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Predikat Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD)	Predikat	100%	97,93%	Sangat Tinggi (98)	Sangat Tinggi (91,20)*	93,06%	Sangat Tinggi (98)	93,06%
Rata-rata Capaian							93,06%		

Keterangan : *) Realisasi sementara hasil evaluasi tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui realisasi indikator kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa indikator kinerja tersebut memiliki capaian kategori kinerja sebesar 93,06% dengan predikat sangat tinggi dari interval realisasi kinerja kategori antara $91\% \leq 100\%$. Dengan target pada akhir renstra yaitu Sangat Tinggi (98) Bappeda Kabupaten Bengkalis akan berusaha untuk mencapai target yang ditetapkan pada Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026. Berikut ini adalah penjelasan dari indikator kinerja tersebut.

1. Predikat Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD)

Capaian indikator Predikat Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) sebesar 93,06% atau dengan predikat “Sangat Tinggi”, dari target semestinya Predikat Sangat Tinggi (98) realisasi Predikat Sangat Tinggi (91,20). Indikator tersebut mulai dilaksanakan dari Perjanjian Kinerja tahun 2024. Indikator ini belum mencapai target yang telah ditetapkan berdasarkan perubahan terakhir (Prototype) Pohon Kinerja Perangkat Daerah.



Faktor penyebab belum tercapainya target kinerja tersebut antara lain:

- 1) Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Laporan Hasil Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025, telah diidentifikasi beberapa kondisi yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain:
 - a. Terbatasnya sumber daya manusia;
 - b. Kegiatan tidak dapat dilaksanakan akibat keterlambatan pencairan dana;
 - c. Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. Pergeseran anggaran pada beberapa program prioritas.
- 2) Belum konsistennya penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja masing-masing Perangkat Daerah.
- 3) Terdapat beberapa program yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Solusi/ strategi pemecahan masalah, yaitu:

- 1) Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah harus berpedoman pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- 2) Diperlukan pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan secara berkala untuk mengidentifikasi hambatan serta merumuskan solusi yang diperlukan. Program atau kegiatan dengan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada kategori rendah hingga sangat rendah, serta yang dinilai kurang relevan, sebaiknya tidak dilanjutkan pada tahun berikutnya sebelum dilakukan analisis terhadap faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaannya.



- 3) Perlu dilakukan peningkatan pengendalian dan evaluasi terhadap konsistensi penyusunan dokumen perencanaan dengan melaksanakan sinkronisasi secara terintegrasi, yang dimulai dari penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKPD, dengan tetap berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada setiap tahapan perencanaan.
- 4) Perlu dioptimalkan kegiatan pendampingan dan verifikasi secara berkala terhadap Perangkat Daerah di bawah koordinasi bidang terkait pada Bappeda, dalam proses penyusunan dan perumusan perencanaan, agar seluruh kegiatan tetap berpedoman pada dokumen perencanaan daerah yang berlaku.

Sasaran 2 (dua) : Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko dengan indikator Level Maturitas Manajemen Risiko Indeks mendapatkan rata-rata capaian sebesar 95,53% dengan predikat **“Sangat Tinggi”** seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.5

Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran 2

No	Indikator	Satuan	Capaian		2025			Target Tahun 2026	Capaian 2025 Terhadap 2026
			2023	2024	Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Level Maturitas Manajemen Risiko Indeks	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	95,53%	100%	95,53%
Rata-rata Capaian							95,53%		

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui realisasi indikator kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa indikator kinerja tersebut memiliki capaian kategori kinerja sebesar 95,53% dengan predikat sangat tinggi dari interval realisasi kinerja kategori antara $91\% \leq 100\%$. Berikut penjelasan dari indikator kinerja tersebut.



2. Level Maturitas Manajemen Risiko Indeks

Capaian indikator Level Maturitas Manajemen Risiko Indeks sebesar 95,53% dari target Level 3 dengan realisasi Level 2 dengan skor MRI sebesar 2,866 dan skor SPIP-T sebesar 2,872. Indikator ini dilaksanakan mulai dari Perjanjian Kinerja tahun 2023 berdasarkan perubahan terakhir (Prototype) Pohon Kinerja Perangkat Daerah.

Faktor pendukung, yaitu:

- 1) Diperlukan komitmen yang kuat dari Pimpinan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Manajemen Risiko sebagai bagian integral dari pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- 2) Perlu dilakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP), efektivitas RTP, keterjadian risiko, serta dampaknya terhadap pencapaian kinerja Perangkat Daerah.
- 3) Faktor risiko hendaknya dijadikan dasar dan pertimbangan utama dalam setiap proses pengambilan keputusan, guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif serta sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Permasalahan/hambatan, yaitu:

- 1) Penerapan manajemen risiko belum didukung dengan sumber daya yang memadai. Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah mengalokasikan dana untuk penyusunan peta risiko. Namun peta risiko masih digunakan secara formalitas dan belum digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
- 2) Kinerja penerapan manajemen risiko belum digunakan sebagai dasar penilaian pada UPR tingkatan strategis dan operasional unit kerja secara memadai. Hal tersebut disebabkan belum adanya integrasi antara manajemen risiko dan sistem penilaian kinerja serta pemahaman dan komitmen terhadap manajemen risiko masih rendah.



- 3) Rencana tindak pengendalian risiko operasional dan strategis unit kerja belum sepenuhnya relevan dengan tujuan yang ingin dicapai dan secara substansi dapat mengurangi dampak atau menghilangkan penyebab dengan realistis.
- 4) Monitoring risiko dan tindak pengendalian belum dilakukan secara konsisten. Langkah monitoring sudah ada sesuai dengan kebijakan dan sudah dilakukan monitoring terhadap risiko dan tindak pengendalian untuk MR tahun 2022. Namun untuk MR tahun 2024 belum dilakukan monitoring.

Sasaran 3 (tiga) : Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Pencapaian kinerja Perangkat Daerah. Hasil evaluasi pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Pencapaian kinerja Perangkat Daerah mendapatkan rata-rata capaian 97,93% dengan predikat nilai kinerja “Sangat Tinggi” sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.6
Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran 3

No	Indikator	Satuan	Capaian		2025			Target Tahun 2026	Capaian 2025 Terhadap 2026
			2023	2024	Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	100%	97,93%	80	78,35*	97,93%	A	97,93%
Rata-rata Capaian							97,93%		

Keterangan : *) Realisasi sementara hasil evaluasi tahun 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui realisasi dari indikator kinerja selama 2025 menunjukkan bahwa indikator kinerja tersebut memiliki capaian kategori kinerja sebesar 97,93%



dengan predikat sangat tinggi dari interval realisasi kinerja kategori antara $91\% \leq 100\%$ dengan penjelasan sebagai berikut ini.

3. Predikat Capaian Kinerja Perangkat daerah

Capaian dari indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja target nilai 80 realisasi 78,35 (hasil sementara) dengan capaian 97,93% atau nilai kinerja dengan predikat “Sangat Tinggi”. Dibandingkan target akhir periode Renstra Tahun 2021-2026 nilai 80 dengan realisasi tahun 2025 nilai 78,35 capaian sebesar 97,93% dengan asumsi target akhir periode Renstra dapat dicapai. Hasil ini diperoleh dari evaluasi terhadap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi internal atas perjanjian kinerja tahun 2025 berdasarkan rencana aksi dan monitoring serta evaluasi rencana aksi tahun 2025 dengan berpedoman Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.

Faktor pendukung/penyebab, yaitu:

- 1) Pejabat struktural yang terdiri atas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, serta Pejabat Fungsional Perencana sebanyak 24 Aparatur Sipil Negara (ASN), seluruhnya telah memiliki kualifikasi pendidikan minimal Sarjana (S1/D4) hingga Magister (S2). Para pejabat tersebut juga telah mengikuti pendidikan penjenjangan jabatan struktural dan jabatan fungsional perencana, serta telah memiliki atau mengikuti berbagai pelatihan peningkatan kompetensi.
- 2) Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis Tahun 2021–2026 telah disinkronkan dengan kebijakan daerah melalui penyesuaian terhadap tujuan dan sasaran strategis, yang difokuskan pada perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten agar selaras



dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2021–2026.

- 3) Telah terdapat kebijakan dan peraturan teknis yang jelas sebagai dasar dalam penyusunan Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, dan Pengukuran Kinerja. Selain itu, telah disusun pula Rencana Aksi serta mekanisme Monitoring dan Evaluasi terhadap setiap sasaran dan indikator kinerja, yang diselaraskan dengan program serta alokasi anggaran berbasis kinerja.

Solusi/Pemecahan masalah, yaitu:

- 1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis dilakukan melalui peningkatan kualifikasi pendidikan bagi staf pelaksana dan pejabat fungsional umum ke jenjang pendidikan Diploma III (D3), Diploma IV (D4), dan Sarjana (S1). Selain itu, dilakukan pula pengembangan kompetensi dan peningkatan kemahiran teknis bagi aparatur perencana atau analis lainnya guna memperkuat kapasitas sebagai aparatur perencana yang profesional.
- 2) Dilakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap Analisis Beban Kerja (ABK) agar dapat digunakan dalam penetapan sasaran kinerja pegawai secara lebih terukur dan obyektif, serta mendukung peningkatan kinerja individu melalui pelaksanaan *dialog kinerja* secara berkala.
- 3) Disusun dan ditetapkan peraturan serta Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penyusunan dan pengumpulan data kinerja yang berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan pengukuran dan penilaian kinerja Perangkat Daerah.
- 4) Disusun dan ditetapkan peraturan serta petunjuk teknis berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) penyusunan dan penetapan perencanaan yang mendukung penyempurnaan tujuan, sasaran,



dan indikator kinerja agar memenuhi prinsip *SMART* (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).

3.3. Realisasi Anggaran

Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 sebesar Rp. 20.616.473.205,00 dengan realisasi sebesar Rp. 19.515.243.788,00 atau 94,66%. Terjadinya peningkatan realisasi keuangan dibandingkan pada tahun 2024 sebesar 80,24%. Adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada Sasaran 2 Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko dengan indikator Level Maturitas Manajemen Risiko Indeks sebesar Rp. 3.654.572.431,00 atau 98,35%. Sementara penyerapan anggaran yang terkecil pada Sasaran 3 yaitu Capaian Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Pencapaian kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 14.640.544.284,00 atau 93,37%. Rincian capaian kinerja dan anggaran di tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Tahun 2025

Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja	20.616.473.205,00	19.515.243.788,00	94,66

Sementara itu, untuk anggaran sesuai dengan sasaran kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Sesuai Sasaran Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja	Anggaran		
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	93,06%	2.260.231.386,00	2.190.120.196,00	96,90
2.	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko	95,53%	3.715.697.535,00	3.654.572.431,00	98,35
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	97,93%	14.640.544.284,00	13.670.551.162,00	93,37
Total			20.616.473.205,00	19.515.243.789,00	94,66

3.4. Analisis Efisiensi

Berdasarkan data capaian kinerja dan realisasi anggaran terhadap sasaran, maka tingkat efisiensi terhadap sasaran telah tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 3.9
Tingkat Efisiensi Anggaran Capaian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	93,06%	96,90	-
2.	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Indeks	95,53%	98,35	-
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	97,93%	93,37	4,56
Rata-rata			96,20	

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Sasaran Kinerja 3 (tiga) Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Pencapaian kinerja Perangkat Daerah memiliki tingkat efisiensi sebesar 4,56% dari realisasi anggaran sebesar 93,37% dengan capaian kinerja sasaran sebesar 97,93%. Adapun rata-rata tingkat efisiensi anggaran capaian kinerja sebesar 4,56%



BAB IV

PENUTUP

Perjanjian Kinerja tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis terdiri dari 3 sasaran dengan 3 indikator kinerja utama. Terdapat 3 sasaran dengan 3 indikator yang memiliki predikat sangat tinggi. Sasaran 1 (satu) Meningkatnya Kualitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Predikat Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) target Predikat Sangat Tinggi (98) dengan realisasi Predikat Sangat Tinggi (91,20) (sementara) dengan capaian 93,06% memiliki kategori kinerja Sangat tinggi. Selanjutnya Sasaran 2 (dua) Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko dengan indikator Level Maturitas Manajemen Risiko Indeks target Level 3 realisasi Level 2 dengan capaian 95,53% memiliki kategori kinerja sangat tinggi dan terakhir Sasaran 3 (tiga) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator target 80 realisasi 78,35 dengan capaian 97,93%, memiliki kategori kinerja sangat tinggi.

Langkah-langkah strategis jangka pendek yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis dalam upaya meningkatkan kinerja pada tahun 2026 antara lain sebagai berikut:

1. Memperkuat keterpaduan dan keselarasan antara tahapan perencanaan dan pelaksanaan program melalui peningkatan kualitas pada setiap proses perencanaan, sehingga seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara optimal serta diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
2. Mendorong peningkatan komitmen pimpinan Perangkat Daerah dalam penerapan Manajemen Risiko sebagai bagian yang tidak



terpisahkan dari penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

3. Meningkatkan mutu, akurasi, dan keterandalan data perencanaan pembangunan daerah melalui pengumpulan dan pemanfaatan data teknis dan data sektoral yang bersumber dari Perangkat Daerah serta Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai data makro pendukung proses perencanaan;

LAMPIRAN I

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RINTO, SE, M.Si
NIP : 198106012009031002
Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : KASMARNI, S.Sos.M.MP
Jabatan : Bupati Bengkulu

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, 13 Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

BUPATI BENGKALIS

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

KASMARNI, S.Sos., M.MP

RINTO, SE., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 198106012009031002

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Predikat Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD)	Sangat Tinggi (98)
2.	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko	Level Maturitas MRI	Level 3
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	80
4.	Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	100%
		Nilai Area Perencanaan daerah pada MCP Kopsurgah MCP KPK	85%

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.855.294.942,00
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.479.816.741,00
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.029.906.795,00

Bengkalis, 13 Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

BUPATI BENGKALIS

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH



KASMARNI, S.Sos., M.MP



RINTO, SE., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 198106012009031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. SYAHRUDIN, S.Si
NIP : 19710709199803 1 002
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : RINTO, SE, M.Si
NIP : 19810601 200903 1 002
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, 14 Januari 2025

Pihak Kedua

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH


RINTO, SE, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19810601 200903 1 002

Pihak Pertama

SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH


H. SYAHRUDIN, S.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19710709199803 1 002



**PERJANJIAN KINERJA ESELON III
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Tercapainya Kualitas Perencanaan Kinerja	Persentase Peningkatan Nilai Perencanaan Kinerja	1 %
2.	Tercapainya Kualitas Pengukuran Kinerja	Persentase Peningkatan Nilai Pengukuran Kinerja	1 %
3.	Tercapainya Kualitas Pelaporan Kinerja	Persentase Peningkatan Nilai Pelaporan Kinerja	1 %
4.	Tercapainya Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Persentase Peningkatan Nilai Evaluasi Internal	1 %
5.	Tercapainya Pencegahan Korupsi melalui Penilaian Integritas ASN	Sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	1 Kali
6.	Tercapainya Kualitas Pelaporan Kinerja	Ketepatan waktu penyampaian laporan semester BMD Perangkat Daerah	100%

Nama Program yang Mendukung Sasaran Program

Anggaran

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Rp 17.029.906.795,00

Bengkalis, 14 Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

RINTO, SE, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19810601 200903 1 002

H. SYAHRIJUDIN, S.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19710709199803 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDRIUS, M.Si
NIP : 19761123 201102 1 001
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : RINTO, SE, M.Si
NIP : 19810601 200903 1 002
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, 14 Januari 2025

Pihak Kedua

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

RINTO, SE, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19810601 200903 1 002

Pihak Pertama

KEPALA BIDANG PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH

ANDRIUS, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19761123 201102 1 001



**PERJANJIAN KINERJA ESELON III
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tercapainya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	100%
2	Tercapainya Pengendalian Risiko Perangkat Daerah	Persentase Hasil Pengumpulan Risiko Perangkat Daerah	100%
3	Tercapainya Pencegahan Korupsi pada tahapan Perencanaan	Persentase Pemenuhan Data Penilaian Perencanaan MCP KPK	85%

Nama Program yang Mendukung Sasaran Program

Anggaran

- | | | |
|--|----|------------------|
| 1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Rp | 3.855.294.942,00 |
|--|----|------------------|

Bengkalis, 14 Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

KEPALA BIDANG PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH

RINTO, SE, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19810601 200903 1 002

ANDRIUS, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19761123 201102 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAN ZULKARNANDA, M.Sc
NIP : 19840830 201102 1 001
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : RINTO, SE, M.Si
NIP : 19810601 200903 1 002
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, 14 Januari 2025

Pihak Kedua

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

RINTO, SE, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19810601 200903 1 002

Pihak Pertama

KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN
SUMBER DAYA ALAM

WAN ZULKARNANDA, M.Sc

Pembina (IV/a)

NIP. 19821023 200901 1 007



**PERJANJIAN KINERJA ESELON III
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Tercapainya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Keselarasan Renja terhadap Renstra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	99%

Nama Program yang Mendukung Sasaran Program

Anggaran

- | | | |
|---|----|------------------|
| 1. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Rp | 1.426.480.820,00 |
|---|----|------------------|

Bengkalis, 14 Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN
SUMBER DAYA ALAM

RINTO, SE, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19810601 200903 1 002

WAN ZULKARNANDA, M.Sc

Pembina (IV/a)

NIP. 19821023 200901 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHMAH WATI PUTRI, ST., M.Si
NIP : 19870806 200903 2 003
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : RINTO, SE, M.Si
NIP : 19810601 200903 1 002
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, 14 Januari 2025

Pihak Kedua

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH


RINTO, SE, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19810601 200903 1 002

Pihak Pertama

KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN


RAHMAH WATI PUTRI, ST., M.Si

Pembina (IV/a)
NIP. 19870806 200903 2 003



**PERJANJIAN KINERJA ESELON III
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Tercapainya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Renja terhadap Renstra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	99%

Nama Program yang Mendukung Sasaran Program

Anggaran

1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 1.276.862.520,00

Bengkalis, 14 Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN


RINTO, SE, M.Si

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19810601 200903 1 002


RAHMAH WATI PUTRI, ST., M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19870806 200903 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD IKHWAN SYUHADA, S.STP, M.Si
NIP : 19920227 201406 1 001
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : RINTO, SE, M.Si
NIP : 19810601 200903 1 002
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, 14 Januari 2025

Pihak Kedua

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH


RINTO, SE, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19810601 200903 1 002

Pihak Pertama

KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA


MUHAMMAD IKHWAN SYUHADA, S.STP, M.Si
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19920227 201406 1 001



**PERJANJIAN KINERJA ESELON III
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Tercapainya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan	Persentase Keselarasan Renja terhadap Renstra Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan	99%
2.	Terlaksananya perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja dan evaluasi internal pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase penatausahaan keuangan dan evaluasi kinerja bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan	100%
3.	Terlaksananya partisipasi dan penilaian integritas ASN bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase ASN yang berpartisipasi dalam penilaian integritas internal	100%
4.	Terlaksananya koordinasi dan konvergensi perencanaan dan penganggaran percepatan penurunan stunting bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase hasil integrasi penyusunan konvergensi perencanaan dan penganggaran percepatan penurunan stunting	100%
5.	Terlaksananya koordinasi penyusunan perencanaan dan penganggaran Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase hasil penyusunan perencanaan dan penganggaran Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah	100%

Nama Program yang Mendukung Sasaran Program

Anggaran

- | | | |
|---|----|------------------|
| 1. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Rp | 2.554.175.363,00 |
|---|----|------------------|

Bengkalis, 14 Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA

RINTO, SE, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19810601 200903 1 002

MUHAMMAD IKHWAN SYUHADA, S.STP, M.Si
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19920227 201406 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRWANSYAH, SP
NIP : 19740402 199803 1 003
Pangkat/Gol. : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : H. SYAHRUDIN, S.Si
NIP : 19710709 199803 1 002
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

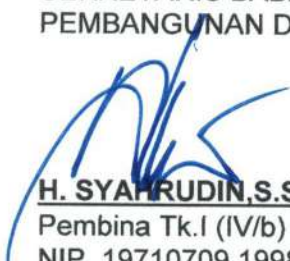
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, 14 Januari 2025

Pihak Kedua

SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH


H. SYAHRUDIN, S.Si

Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19710709 199803 1 002

Pihak Pertama

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
DAN PERLENGKAPAN


IRWANSYAH, SP

Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19740402 199803 1 003



**PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Tersedianya Laporan Pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan sesuai SAP	1 laporan

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 493.034.000,00
2. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 1.693.016.474,00
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 10.212.349.578,00

Bengkalis, 14 Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
DAN PERLENGKAPAN


H. SYAHRUDIN, S.Si

Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19710709 199803 1 002


IRWANSYAH, SP

Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19740402 199803 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUSNELI, SP
NIP : 19820626 200801 2 025
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : H. SYAHRUDIN, S.Si
NIP : 19710709 199803 1 002
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, 14 Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN


H. SYAHRUDIN, S.Si

Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19710709 199803 1 002


YUSNELI, SP

Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP. 19820626 200801 2 025



**PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tercapainya Kompetensi Aparatur Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur Perencana sesuai Kompetensi	1 laporan
2	Tercapainya Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang berpartisipasi dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	1 laporan

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 172.800.000,00
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp 92.973.558,00
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 619.359.752,00
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 301.460.000,00
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 128.568.576,00
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 54.000.000,00
7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 285.125.511,00
8. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 64.987.700,00
9. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 445.894.000,00
10. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 199.261.200,00
11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 260.450.000,00
12. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 253.470.000,00
13. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Rp 249.600.000,00
14. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 272.599.000,00

Bengkalis, 14 Januari 2025

Pihak Kedua

SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH


H. SYAHRUDIN, S.Si

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19710709 199803 1 002

Pihak Pertama

KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN


YUSNELI, SP

Penata Muda Tk. I (III/b)

NIP. 19820626 200801 2 025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. RIZKI HERMEDIANTO, BA.,MT
NIP : 19890821 201503 1 005
Pangkat/Gol. : Penata (III/c)
Jabatan : Perencana Ahli Muda

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : H. SYAHRUDIN,S.Si
NIP : 19710709 199803 1 002
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, 14 Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

PERENCANA AHLI MUDA


H. SYAHRUDIN,S.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19710709 199803 1 002


M. RIZKI HERMEDIANTO, BA.,MT

Penata (III/c)

NIP. 19890821 201503 1 005



**PERJANJIAN KINERJA FUNGSIONAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Dokumen Perencanaan yang Selaras	Jumlah Paket Dokumen Perencanaan yang Selaras	1 Paket Dokumen
2.	Tersedianya Data yang handal	Persentase Data yang Relevan	100%
3.	Terwujudnya Pengukuran Kinerja secara Berkala	Jumlah Pengukuran Kinerja Tahunan	1 Kali
4.	Tersedianya Dokumen Pelaporan Kinerja Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Sesuai Standar	1 Dokumen
5.	Terwujudnya Pengendalian Internal	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kinerja Tahunan	4 Kali
6.	Ditindaklanjutinya Hasil Evaluasi AKIP Internal	Persentase Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Internal	100%

Sub Kegiatan

	Anggaran
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 708.562.248,00
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 194.527.198,00
3. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 327.868.000,00

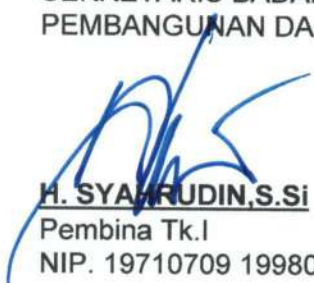
Bengkalis, 14 Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

PERENCANA AHLI MUDA


H. SYAH RUDIN, S.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19710709 199803 1 002


M. RIZKI HERMEDIANTO, BA., MT

Penata (III/c)

NIP. 19890821 201503 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIYANA EKSADHARMA, ST, M.Soc.Sc
NIP : 19830824 201001 2 026
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Perencana Ahli Muda

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : ANDRIUS, M.Si
NIP : 19761123 201102
Pangkat/Gol. : Pembina I (IV/a)
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, 14 Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

KEPALA BIDANG PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH

PERENCANA AHLI MUDA


ANDRIUS, M.Si

Pembina I (IV/a)

NIP. 19761123 201102 1 001


DIYANA EKSADHARMA, ST, M.Soc.Sc

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19830824 201001 2 026



**PERJANJIAN KINERJA FUNGSIONAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pengendalian Pembangunan Daerah	Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 laporan
		Hasil Monitoring dan Evaluasi Program Unggulan Daerah	1 Laporan

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Rp 246.284.110,00
2. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Rp 1.295.137.658,00
3. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp 276.685.949,00

Bengkalis, 14 Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

KEPALA BIDANG PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH

PERENCANA AHLI MUDA


ANDRIUS, M.Si
Pembina I (IV/a)
NIP. 19761123 201102 1 001


DIYANA EKSADHARMA, ST, M.Soc.Sc
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19830824 201001 2 026



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DENDI HENRI, SE
NIP : 19781030 200312 1 004
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Perencana Ahli Muda

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : ANDRIUS, M.Si
NIP : 19761123 201102
Pangkat/Gol. : Pembina I (IV/a)
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, 14 Januari 2025

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH


ANDRIUS, M.Si

Pembina I (IV/a)

NIP. 19761123 201102 1 001

Pihak Pertama

PERENCANA AHLI MUDA


DENDI HENRI, SE

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19781030 200312 1 004



**PERJANJIAN KINERJA FUNGSIONAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pengelolaan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Tersedianya Data SIPD	1 Laporan

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Rp 161.241.751,00
2. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Rp 127.688.438,00

Bengkalis, 14 Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

KEPALA BIDANG PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH

PERENCANA AHLI MUDA


ANDRIUS, M.Si

Penata Tingkat I

NIP. 19761123 201102 1 001



DENDI HENRI, SE

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19781030 200312 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI BANUN PRIBADI, SKM, M. Si
NIP : 19740319 200012 2 001
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Perencana Ahli Muda

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : ANDRIUS, M.Si
NIP : 19761123 201102
Pangkat/Gol. : Pembina I (IV/a)
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, 14 Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

KEPALA BIDANG PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH

PERENCANA AHLI MUDA

ANDRIUS, M.Si
Pembina I (IV/a)
NIP. 19761123 201102 1 001

SRI BANUN PRIBADI, SKM, M. Si
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19740319 200012 2 001



**PERJANJIAN KINERJA FUNGSIONAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pengumpulan Rencana Tindak Pengendalian Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Tindak Pengendalian Perangkat Daerah	36 RTP
2	Terlaksananya Pengumpulan Peta Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	36 Peta Risiko
3	Terlaksananya Pengumpulan Dokumen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Risiko Strategis dan Risiko Operasional Perangkat Daerah	36 Risiko
4	Terlaksananya Pencegahan Korupsi pada tahapan penyusunan dokumen RKPD	Dokumen RKPD yang selaras dengan RPJMD	1 Dokumen

Sub Kegiatan

Anggaran

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Pelaksanaan Konsultasi Publik | Rp 63.338.422,00 |
| 2. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Rp 360.281.460,00 |
| 3. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Rp 1.148.506.806,00 |

Bengkalis, 14 Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

KEPALA BIDANG PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH

PERENCANA AHLI MUDA

ANDRIUS, M. Si

Pembina I (IV/a)

NIP. 19761123 201102 1 001

SRI BANUN PRIBADI, SKM, M. Si

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19740319 200012 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARAFTU HARAMAIN, SE, M.MA
NIP : 19770616 200604 1 006
Pangkat/Gol. : Penata (III/c)
Jabatan : Perencana Ahli Muda

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : WAN ZULKARNANDA, M.Sc
NIP : 19840830 201102 1 001
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, 14 Januari 2025

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN
SUMBER DAYA ALAM

WAN ZULKARNANDA, M.Sc
Pembina (IV/a)
NIP. 19840830 201102 1 001

Pihak Pertama

PERENCANA AHLI MUDA

ARAFTU HARAMAIN, SE, M.MA
Penata (III/c)
NIP. 19770616 200604 1 006



**PERJANJIAN KINERJA FUNGSIONAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pengembangan Usaha dan Ketenagakerjaan	Jumlah Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Usaha dan Ketenagakerjaan	3 laporan

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp 29.998.172,00
2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp 69.988.896,00
3. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rp 379.157.939,00

Bengkalis, 14 Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN
SUMBER DAYA ALAM

PERENCANA AHLI MUDA

WAN ZULKARNANDA, M.Sc

ARAFTU HARAMAIN, SE, M.MA

Pembina (IV/a)

Penata (III/c)

NIP. 19840830 201102 1 001

NIP. 19770616 200604 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERI CAHYADI, S.Pi
NIP : 19780202 200212 1 008
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Perencana Ahli Muda

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : WAN ZULKARNANDA, M.Sc
NIP : 19840830 201102 1
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, 14 Januari 2025

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN
SUMBER DAYA ALAM

WAN ZULKARNANDA, M.Sc
Pembina (IV/a)
NIP. 19840830 201102 1 001

Pihak Pertama

PERENCANA AHLI MUDA

ERI CAHYADI, S.Pi
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19780202 200212 1 008



**PERJANJIAN KINERJA FUNGSIONAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup	Jumlah Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup	5 laporan

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp 123.048.000,00
2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Rp 449.981.913,00

Bengkalis, 14 Januari 2025

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN
SUMBER DAYA ALAM

WAN ZULKARNANDA, M.Sc
Pembina (IV/a)
NIP. 19840830 201102 1 001

Pihak Pertama

PERENCANA AHLI MUDA

ERI CAHYADI, S.Pi
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19780202 200212 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUFRIYANTI, SP
NIP : 19850427 201001 2 006
Pangkat/Gol. : Penata (III/c)
Jabatan : Perencana Ahli Muda

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : WAN ZULKARNANDA, M.Sc
NIP : 19840830 201102 1
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, 14 Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN
SUMBER DAYA ALAM

PERENCANA AHLI MUDA

WAN ZULKARNANDA, M.Sc

Pembina (IV/a)

NIP. 19840830 201102 1 001

SUFRIYANTI, SP

Penata (III/c)

NIP. 19850427 201001 2 006



**PERJANJIAN KINERJA FUNGSIONAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pendanaan dan Investasi	Jumlah Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan dan Investasi	3 laporan

Sub Kegiatan

Anggaran

- | | | |
|---|----|----------------|
| 1. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Rp | 120.400.000,00 |
| 2. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Rp | 115.716.000,00 |
| 3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Rp | 138.189.900,00 |

Bengkalis, 14 Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN
SUMBER DAYA ALAM

PERENCANA AHLI MUDA

WAN ZULKARNANDA, M.Sc

SUPRIYANTI, SP

Pembina (IV/a)

Penata (III/c)

NIP. 19840830 201102 1 001

NIP. 19850427 201001 2 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. RIDHO KURNIAWAN, ST, M. Si
NIP : 19840314 201001 1 006
Pangkat/Gol. : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Perencana Ahli Muda

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : RAHMAH WATI PUTRI, ST., M. Si
NIP : 19870806 200903 2 003
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, 14 Januari 2025

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR
DAN KEWILAYAHAN

RAHMAH WATI PUTRI, ST., M. Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19870806 200903 2 003

Pihak Pertama

PERENCANA AHLI MUDA

H. RIDHO KURNIAWAN, ST, M. Si
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19840314 201001 1 006



**PERJANJIAN KINERJA FUNGSIONAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang sarana dan prasarana wilayah	Jumlah Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah	2 laporan

Sub Kegiatan

1. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

Anggaran
Rp 662.010.715,00

Bengkalis, 14 Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR
DAN KEWILAYAHAN

PERENCANA AHLI MUDA


RAHMAH WATI PUTRI, ST., M. Si

Pembina (IV/a)
NIP. 19870806 200903 2 003



H. RIDHO KURNIAWAN, ST, M. Si

Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19840314 201001 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JEPRI, A.md
NIP : 19790603 200701 1 004
Pangkat/Gol. : Penata (III/c)
Jabatan : Fungsional Perencana Ahli Muda

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : RAHMAH WATI PUTRI, ST., M.Si
NIP : 19870806 200903 2 003
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, 14 Januari 2025

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR
DAN KEWILAYAHAN

RAHMAH WATI PUTRI, ST., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19870806 200903 2 003

Pihak Pertama

PERENCANA AHLI MUDA

JEPRI, A.md
Penata (III/c)
NIP. 19790603 200701 1 004



**PERJANJIAN KINERJA FUNGSIONAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pengembangan Wilayah	Jumlah Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Wilayah	3 laporan

Sub Kegiatan

Anggaran

- | | | |
|---|----|----------------|
| 1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Rp | 34.990.240,00 |
| 2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Rp | 33.966.068,00 |
| 3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Rp | 44.978.832,00 |
| 4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Rp | 249.954.261,00 |

Bengkalis, 14 Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR
DAN KEWILAYAHAN

PERENCANA AHLI MUDA

RAHMAH WATI PUTRI, ST., M.Si

JEPRI, A.md

Pembina (IV/a)

Penata (III/c)

NIP. 19870806 200903 2 003

NIP. 19790603 200701 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : T. FAHRUL RAZI, SP
NIP : 19820213 200901 1 007
Pangkat/Gol. : Penata (III/c)
Jabatan : Perencana Ahli Muda

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : RAHMAH WATI PUTRI, ST., M.Si
NIP : 19870806 200903 2 003
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, 14 Januari 2025

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR
DAN KEWILAYAHAN

RAHMAH WATI PUTRI, ST., M.Si

Pembina (IV/a)
NIP. 19870806 200903 2 003

Pihak Pertama

PERENCANA AHLI MUDA

T. FAHRUL RAZI, SP

Penata (III/c)
NIP. 19820213 200901 1 007



**PERJANJIAN KINERJA FUNGSIONAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Permukiman dan Kebencanaan	Jumlah Perencanaan Pembangunan Bidang Permukiman dan Kebencanaan	3 laporan

Sub Kegiatan

Anggaran

- | | | |
|---|----|----------------|
| 1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Rp | 70.985.816,00 |
| 2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Rp | 44.977.275,00 |
| 3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Rp | 134.999.313,00 |

Bengkalis, **14** Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR
DAN KEWILAYAHAN

PERENCANA AHLI MUDA

RAHMAH WATI PUTRI, ST., M.Si

T. FAHRUL RAZI, SP

Pembina (IV/a)

Penata (III/c)

NIP. 19870806 200903 2 003

NIP. 19820213 200901 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DONATUS HASTHOWURYONO, SKM
NIP : 19690807 198911 1 001
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Perencana Ahli Muda

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : MUHAMMAD IKHWAN SYUHADA, S.STP, M.Si
NIP : 19920227 201406 1 001
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, Januari 2025

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA

MUHAMMAD IKHWAN SYUHADA, S.STP, M.Si
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19920227 201406 1 001

Pihak Pertama

PERENCANA AHLI MUDA

DONATUS HASTHOWURYONO, SKM
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19690807 198911 1 001



**PERJANJIAN KINERJA FUNGSIONAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan	Target
1	2	3	4
1.	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan sosial	Jumlah Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial	4 Dokumen
2.	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) substansi Kesehatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Substansi Kesehatan	4 Dokumen
3.	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia substansi Kesehatan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia substansi kesehatan	4 Laporan
4.	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia substansi Kesehatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia substansi Kesehatan	4 Laporan
5.	Terlaksananya Sinkronisasi dan Sinergitas Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia substansi Kesehatan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia substansi Kesehatan	4 Laporan

Sub Kegiatan

Anggaran

- | | | |
|---|----|----------------|
| 1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Rp | 651.084.953,00 |
| 2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Rp | 75.275.042,00 |
| 3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Rp | 75.275.490,00 |

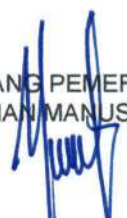
Bengkalis, Januari 2025

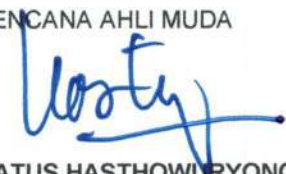
Pihak Kedua

Pihak Pertama

KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA

PERENCANA AHLI MUDA


MUHAMMAD IKHWAN SYUHADA, S.STP. M.Si
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19920227 201406 1 001


DONATUS HASTHOWURYONO, SKM
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19690807 198911 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISNAIDI, SP
NIP : 19750721 200701 1 003
Pangkat/Gol. : Penata (III/c)
Jabatan : Perencana Ahli Muda

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : MUHAMMAD IKHWAN SYUHADA, S.STP, M.Si
NIP : 19920227 201406 1 001
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, Januari 2025

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA


MUHAMMAD IKHWAN SYUHADA, S.STP, M.Si
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19920227 201406 1 001

Pihak Pertama

PERENCANA AHLI MUDA


ISNAIDI, SP
Penata (III/c)
NIP. 19750721 200701 1 003



**PERJANJIAN KINERJA FUNGSIONAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan	Target
1	2	3	4
1.	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pendidikan dan kepariwisataan	Jumlah Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kepariwisata	4 Dokumen
2.	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) substansi Kepegawaian dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) substansi Kepegawaian dan Kesatuan Bangsa	4 Dokumen
3.	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia substansi Kepegawaian dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia substansi Kepegawaian dan Kesatuan Bangsa	4 Laporan
4.	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia substansi Kepegawaian dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia substansi Kepegawaian dan Kesatuan Bangsa	4 Laporan
5.	Terlaksananya Sinkronisasi dan Sinergitas Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia substansi Kepegawaian dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia substansi Kepegawaian dan Kesatuan Bangsa	4 Laporan

Sub Kegiatan

Anggaran

1. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Rp 449.610.590,00

Bengkalis, Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA

PERENCANA AHLI MUDA


MUHAMMAD IKHWAN SYUHADA, S.STP, M.Si
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19920227 201406 1 001


ISNAIDI, SP
Penata (III/c)
NIP. 19750721 200701 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TATANG SYAHRIZAL, S.Sos
NIP : 19821023 200901 1 007
Pangkat/Gol. : Penata (III/c)
Jabatan : Perencana Ahli Muda

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : MUHAMMAD IKHWAN SYUHADA, S.STP, M.Si
NIP : 19920227 201406 1 001
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

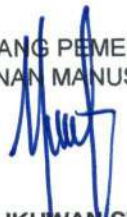
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, Januari 2025

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA


MUHAMMAD IKHWAN SYUHADA, S.STP, M.Si
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19920227 201406 1 001

Pihak Pertama

PERENCANA AHLI MUDA


TATANG SYAHRIZAL, S.Sos
Penata (III/c)
NIP. 19821023 200901 1 007

LAMPIRAN II

INDIKATOR KINERJA UTAMA PROTOTYPE TAHUN 2025

**TABEL 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2021-2026**

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	Kondisi Ext Thn 2020	TARGET KINERJA TAHUN KE						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Berkarakter		Indek Reformasi Birokrasi	50	50	55	60	63	65	72	72
	Meningkatnya Kualitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Predikat Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD)	94,54	Sangat Tinggi (96)	Sangat Tinggi (96)	Sangat Tinggi (97)	Sangat Tinggi (97)	Sangat Tinggi (98)	Sangat Tinggi (98)	Sangat Tinggi (98)
	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko	Level Maturitas Manajemen Risiko Indeks	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	60	65	70	75	80	80	80	80

Bengkalis, Juli 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS



RINTO, SE., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 198106012009031002